Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Kontribusi K.H. Ahmad Dahlan dalam Membangun Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas dalam Modernisasi Pendidikan Islam

Dennis Putri Yuniar
UIN Sunan Ampel Surabaya
ptnrdennis30@gmail.com
Amiq
UIN Sunan Ampel Surabaya
amiq@uinsa.ac.id
Abdurrahman
Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
abdurrahman.adab01@gmail.com

Abstrak: Sistem pendidikan Islam pada awal abad ke-20 di Indonesia masih bersifat tradisional dan terpisah dari ilmu pengetahuan umum, sehingga menimbulkan dikotomi keilmuan yang membatasi daya saing umat Islam di tengah modernisasi kolonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dalam membangun sistem pendidikan Islam yang inklusif dan berkualitas melalui integrasi kurikulum agama dan umum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan merujuk pada literatur biografis serta kajian pemikiran pendidikan Islam sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Ahmad Dahlan mendobrak dikotomi pendidikan tradisional-kolonial dengan mendirikan sekolah bersistem klasikal yang memadukan kurikulum pesantren dan model Belanda, menerapkan metode kontekstual sebagai pengganti sorogan dan hafalan, serta merumuskan konsep pendidikan "ulama-intelek" untuk membentuk pribadi yang utuh serta intelektual, spiritual, dan sosial. Model pendidikan ini terbukti relevan sebagai basis pengembangan pendidikan Islam inklusif di era modern, khususnya dalam menjawab tantangan integrasi keilmuan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.
Kata Kunci: *inklusif; K.H. Ahmad Dahlan; modernisasi; Muhammadiyah; pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan generasi yang cerdas, memiliki daya berpikir kritis, serta mampu menghadapi tantangan zaman membutuhkan pendidikan sebagai salah satu bagian dasar dalam perkembangan masyarakat. Selain memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan juga berfungsi untuk membangun karakter dan nilai moral yang dapat memengaruhi segala sisi individu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, pendidikan juga mengalami perubahan mulai dari pendidikan sederhana hinga bentuk pendidikan kompleks yang dipengaruhi oleh sosial budaya

(Kurina, 2025). Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan sejak masa kerajaan, kolonial, hingga masa modern saat ini. Pada awal abad ke-20, saat Kolonial Belanda masih melakukan penjajahan sistem pendidikan di Indonesia mengalami dualisme dengan adanya pendidikan Islam dengan model pesantren dan surau yang hanya terbatas pada pengajaran ilmu agama, model pendidikan ini masih konservatif karena materi yang diberikan hanya seputar agama tanpa adanya materi umum, selain itu metode yang digunakan adalah metode ceramah satu arah, sorogan, dan bandongan. Sedangkan di satu sisi terdapat sekolah kolonial Belanda yang lebih modern dengan mengajarkan ilmu umum tanpa adanya muatan keagamaan (Falahuddin, 2017; Ahmad, 2025). Dikotomi keilmuan yang ada menjadi batas dalam ruang gerak dan daya saing umat Islam pribumi dalam menghadapi modernisasi yang dibawa oleh pemerintah kolonial.

K.H. Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah menemph pendidikan di Mekkah dan bertemu dengan banyak ulama serta belajar dari tokoh-tokoh pemikir pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, memberi pengaruh yang besar terhadap pemikiran dan gerakannya dalam memodernisasi pendidikan Islam di Indonesia (Nugraha, 2010). Dengan latar belakang pendidikannya dan melihat kondisi pendidikan, terutama pendidikan Islam di Indonesia saat itu K.H. Ahmad Dahlan menyadari bahwa perlu adanya integrasi antara ilmu agama serta ilmu umum sehingga umat Islam dapat bersaing serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Demi mewujudkan pemikiran tersebut, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang menggabungkan kurikulum pendidikan agama dan umum dengan pendekatan yang inklusif. Tidak hanya aspek intelektual namun juga karakter dan moral yang ditekankan pada konsep pendidikan yang dikembangkannya, sehingga pendidikan menjadi holistik dan adaptif terhadap perubahan zaman (Mukhtarom, 2015).

Dalam analisis inklusivitas yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan, penelitian ini menggunakan kerangka konsep pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam Deklarasi Salamanca (Salamanca Statement) yang merupakan hasil dari Konferensi Dunia UNESCO mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus di Salamanca, Spanyol pada 1994. Konferensi ini menegaskan bahwa setiap sistem pendidikan sepatutnya dirancang dengan mengakomodasi keragaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik tanpa adanya diskrminasi (UNESCO, 1994).

Hasil dari konferensi tersebut kemudian diadopsi di Indonesia dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa

pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa membedakan kondisi untuk belajar bersama (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Namun dalam perspektif yang lebih luas, pendidikan inklusif bukan hanya dalam konteks penempatan anak berkebutuhan khusus, namun sebagai agenda dalam transformasi sosial dalam menghilangkan hambatan terhadap akses pendidikan akibat kemiskinan, ketimpangan gender, dan ekslusi sosial secara lebih luas (Ainscow & César, 2006). Dari kerangka konsep di atas dapat diketahui bahwa istilah "inklusif" dalam sistem pendidikan yang diusung oleh K.H. Ahmad Dahlan dapat dipahami sebagai arti bahwa pendidikan, yang sebelumnya hanya tersedia bagi kaum elite colonial atau kelas priyayi yang kemudian secara terbuka diperluas kepada masyarakat pribumi non-elit dan dapat diakses oleh perempuan, yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan sama sekali.

Pendidikan Islam harus dimodernisasi setidaknya dalam tiga hal: pertama, pendidikan keagamaan harus diintegrasikan dengan sains dan teknologi agar lulusan menguasai kedua bidang tersebut, baik secara teoritis maupun praktis; kedua, kurikulum harus diperbarui untuk memenuhi tuntutan zaman; ketiga, lembaga pendidikan Islam serta sistem manajemennya harus diperbarui agar lebih dinamis dan profesional (Azra, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Tarik, Fahmi, Salik, Nisa', dan Hamidah (2024) dengan judul "Relevansi Pemikiran KH. Ahmad Dahlan bagi Perwujudan Pendidikan yang Inklusif"yang menunjukkan gagasan integrasi ilmu agama dan umum serta keterbukaan akses Pendidikan terhadap kelompok terpinggirkan menjadi pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang relevan sebagai landasan pendidikan inklusif. Penelitian tersebut belum menguraikan secara rinci prinsip inklusivitas terwujud dalam struktur kelembagaan dan kurikulum konkret sekolah yang didirikan. Penelitian lain oleh Hamsah, Nurchamidah, dan Rasimin (2021) dalam "Pemikiran Pendidikan KH Ahmad Dahlan dan Relevansinya dengan Dunia Pendidikan Modern" berfokus ada relevansi pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dengan tujuan pendidikan nasional saat ini. Penelitian dilakukan tanpa analisis komparatif historis antara model sekolah yang didirikan dengan sistem penddikan pesantren tradisional ataupun sekolah kolonial Belanda. Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada analisis struktural-komparatif atas sistem pendidikan Muhammadiyah awal, bukan sekadar deskripsi relevansi pemikiran semata.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pembahasan tidak meluas, artikel ini membahas mengenai masalah 1. Biografi K.H. Ahmad Dahlan, 2. Kontribusi K.H. Ahmad Dahlan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas dalam konteks modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui informasi lengkap mengenai objek penelitian dan pendekatan komparatif untuk mengetahui perbedaan atau persamaan pada objek yang diteliti dengan metode penelitian sejarah (historical method) (Sugiyono, 2013; Kuntowijoyo, 2003).

Metode sejarah dilaksanakan melalui empat tahapan yang saling berurutan. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa arsip, dokumen kelembagaan, artikel jurnal, maupun buku rujukan. Tahap kedua adalah kritik sumber, yang terdiri atas kritik eksternal untuk menguji keaslian dan kredibilitas fisik sumber, serta kritik internal untuk menguji kredibilitas isi dan reliabilitas informasi di dalamnya. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran dan penyusunan keterkaitan antarfakta sejarah yang telah diverifikasi menjadi satu kesatuan penjelasan yang koheren. Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penulisan hasil interpretasi tersebut ke dalam narasi ilmiah yang sistematis (Kuntowijoyo, 2003). Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), yakni aktivitas yang mencakup pengumpulan data dari sumber pustaka, pembacaan dan pencatatan informasi, serta pengolahan dan interpretasi bahan penelitian (Zed, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi K.H. Ahmad Dahlan

K.H. Abu Bakar yang merupakan imam Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta dan Siti Aminah menyambut kelahiran Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta yang dikemudian hari berubah namanya menjadi Ahmad Dahlan (Nugraha, 2010). K.H. Ahmad Dahlan tidak pernahh mengenyam pendidikan formal karena pada masa itu banyak umat Islam yang melarang anak-anak mereka bersekolah di sekolah *Gubernemen*. Oleh karena itu, K.H. Ahmad Dhlan diajari membaca dan menulis oleh ayahnya, teman-temannya, serta iparnya. Selain itu, ia memperlajari ilmu *falak* di bawah bimbingan Kyai Dahlan Semarang dan Syekh Muhammad Jamil Jambek, belajar hadis di bawah bimbingan Kyai Mahfudh, ilmu *nahwu* di bawah bimbingan K.H. Muhsin, serta ilmu *fiqih* di bawah bimbingan K.H. Muhammad Shaleh. Pada usia delapan tahun,

ia sudah menguasai membaca dan menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Selama masa remajanya, ia mulai mempelajari dan membaca berbagai buku-buku Islam Mukhtarom, 2015). Karakternya terbentuk berkat didikan agama yang diterimanya, hingga akhirnya ia dikenal sebagai seorang remaja yang rajin dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan (Abdullah, 2015).

Ibadah haji yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan masa tinggalnya di Mekkah pada tahun 1890 dan 1903 merupakan titik balik yang penting dalam perkembangan keyakinan reformisnya. Melalui tulisan-tulisan seperti *Tafsir al-Manar* dan *al-Islam wa al-Nashariyah*, teori-teori para reformis Islam seperti Muhammad Abduh, Ibn Taimiyah, Rasyid Ridha, dan Jamaluddin al-Afghani di kunjungan keduanya. (Kurniasih, 2024). Ia kembali ke Yogyakarta dengan landasan intelektual yang didasarkan pada prinsip-prinsip para reformis Timur Tengah, yaitu memurnikan ajaran Islam serta bersikap terbuka terhadap akal dan ilmu pengetahuan kontemporer.

Setelah kembali dari Mekkah, K.H. Ahmad Dahlan bergabung dengan kelompok-kelompok nasionalis pada masanya seperti Sarekat iSlam, Jami'at Khair, dan Boedi Oetomo serta mulai mengajar agama di Masjid Besar Kauman. Pengalaman-pengalaman ini memperluas pengetahuannya mengenai metode organisasi dan pendidikan Barat serta memperkenalkannya kepada kalangan terpelajar pada masa itu (Nugraha, 2010). Interaksi ini menjadi pendorong baginya untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada 1 Desember 1911, sebagai eksperimen awal dalam menggabungkan kurikulum pendidikan agama dan umum. Pada 18 November 1912, ia mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mengawasi dan melembagakan eksperimen pendidikan ini dalam jangka panjang (Falahuddin, 2017). Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan hingga wafatnya pada 23 Februari 1923.

Kontribusi K.H. Ahmad Dahlan dalam Membangun Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas

K.H. Ahmad Dahlan dianggap sebagai *man of action* yang mewujudkan pprinsip-prinsip Islamnya melalui perbuatan nyata seperti di bidang pendidikan, meski hanya meninggalkan sedikit karya tulis (Mukhtarom, 2020). Ia berpendapat bahwa baik sistem pendidikan kolonial Belanda yang hanya mengajarkan pengetahuan umum tanpa muatan agama, maupun sistem pendidikan Islam tradisional yang lebih berfokus pada aspek keagamaan, keduanya menghasilkan lulusan yang tidak seimbang. Gagasan untuk

mengembangkan “ulama-intelek” atau “intelek-ulama” yang mampu menguasai umum dan agama secara seimbang muncul dari kekhawatiran ini (Mukhtarom, 2020).

Struktur kurikulum dan tenaga pengajar Sekolah Muhammadiyah awal

Pada tanggal 1 Desember 1911, K.H. Ahmad Dahlan menerapkan gagasannya mengenai pendidikan yang mengembangkan “ulama-intelek” dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam (MIDI) di ruang tamu rumahnya, yang hanya berukuran 6 x 2,5 meter dan dilengkapi dengan tiga meja, tiga kursi panjang, dan satu papan tulis (Muhammadiyah, t.t). Mata pelajaran agama (mengaji, *tauhid*, akhlak) dan ilmu umum (matematika, ilmu bumi, anatomi manusia, serta membaca dan menulis dengan huruf Latin) digabungkan dalam kurikulum sekolah tersebut (VOI, 2022). Dalam rekonstruksinya terhadap arsip kebijakan pendidikan Muhammadiyah pada masa kolonial (1911-1942), Setiawan (2013) mengamati bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah memiliki dua rancangan kurikulum yang berbeda yaitu kurikulum sekolah uum dan kurikulum khusus untuk sekolah agama, yang keduanya disusun dalam kerangka kurikulum inti yang sama.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah menerapkan sistem intensif berupa gaji guru, berbeda dengan tradisi pesantren pada masa itu, yang umumnya tidak memberikan gaji tetap kepada pengajarnya (Falahuddin, 2017). Sistem ini dibiayai melalui kombinasi iuran keanggotaan, sumbangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari jamah, uang pangkal murid, serta subsidi dari pemerintah Hindia Belanda (Setiawan, 2013). Untuk menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, Muhammadiyah juga menyusun kalender akademik (Setiawan, 2013).

Perbandingan dengan sistem pesantren tradisional dan sekolah kolonial (HIS/Gubernemen)

Untuk memperjelas posisi sistem pendidikan yang dibangun K.H. Ahmad Dahlan, Tabel 1 membandingkan tiga model pendidikan di Hindia Belanda yang berdampingan pada awal abad ke-20 yaitu pesantren tradisional, sekolah kolonial Belanda (HIS/*Gubernemen*), dan sekolah Muhammadiyah. Azra mengistilahkan model sekolah Muhammadiyah sebagai “Sekolah Umum (Belanda) Plus”, smentara Steenbrink menyebutnya “Sekolah Ultra Konservatif” karena memuat unsur sekolah pemerintah namun tetap kental dengan muatan keislaman (dalam Falahuddin, 2017).

Aspek	Pesantren Tradisional	Sekolah Kolonial (HIS/Gubernemen)	Sekolah Muhammadiyah
Kurikulum	Hanya ilmu agama (tauhid, fiqih, nahwu-sharaf, tafsir)	Hanya ilmu umum (berhitung, bahasa Belanda, ilmu bumi), tanpa pendidikan agama Islam	Integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kurikulum inti (Setiawan, 2013)
Metode pengajaran	Sorogan, wetonan, dan hafalan	Sistem klasikal ala Belanda, bersifat sekuler	Sistem klasikal dengan pendekatan kontekstual, menggantikan sorogan-hafalan
Tempat & sistem kelas	Lesehan di masjid/surau, tanpa penjenjangan kelas formal	Bangku dan kelas berjenjang, meniru sistem sekolah Barat	Bangku dan sistem kelas berjenjang, meniru model Belanda (Falahuddin, 2017)
Status & pembiayaan guru	Umumnya tanpa gaji tetap (sukarela)	Guru pegawai pemerintah kolonial bergaji	Guru diberi insentif gaji, dibiayai iuran jamaah, ZIS, dan uang pangkal (Falahuddin, 2017; Setiawan, 2013)
Akses peserta didik	Umumnya santri laki-laki dari lingkungan muslim taat	Diprioritaskan bagi anak pejabat/priyayi dan kalangan elite pribumi	Terbuka bagi kalangan non-elite serta, melalui ‘Aisyiyah, bagi peserta didik perempuan

Tabel 1: Perbandingan sistem pesantren tradisional, sekolah kolonial, dan sekolah Muhammadiyah, diolah dari Falahuddin (2017) dan Setiawan (2013).

Prinsip Inklusivitas: akses bagi non-elit dan kesetaraan gender

Dalam sistem pendidikan K.H. Ahmad Dahlan dapat dimaknai dalam dua cara. Pertama, dalam hal akses sosial, sekolah-sekolah Muhammadiyah sengaja dibuka bagi kelompok pribumi non-elit, yang biasanya tersingkir dari lembaga-lembaga kolonial yang lebih mengutamakan kelas priyayi dan anak-anak pejabat. Jumlah sekolah Muhammadiyah meningkat dari 9 antara tahun 1912-1923 menjadi 88 sekolah pada 1926 (Asyadulloh, 2026), yang menggambarkan sejauh mana akses pendidikan modern telah

diperluas ke segmen masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif, yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan struktural terhadap akses pendidikan (Ainscow & César, 2006).

Kedua, dalam hal kesetaraan gender, K.H. Ahmad Dahlan dan istrinya, Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan), menjadi pelopor Pendidikan bagi perempuan, yang pada masa itu nyaris tidak memiliki akses pendidikan formal (Mauliddiyah, 2025). Kelompok pengajian perempan Sopo Tresno memulai upaya terobosan ini pada tahun 1914 dan pada tahun 1917 kelompok tersebut secara resmi didirikan sebagai organisasi 'Aisyiyah (Maarif, 2022). Muhammadiyah mendirikan beberapa lembaga pendidikan khusus perempuan melalui 'Aisyiyah, seperti *Kweekschool* Muhammadiyah Istri sebagai sekolah guru putri, Siswa Praja Wanita yang merupakan cikal bakal Nasyiatul 'Aisyiyah untuk remaja putri, kemudian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah *Bustanul Athfal* (Anggraeni, 2023). Siti Bariyah, yang selanjutnya menjadi ketua pertama 'Aisyiyah dan para siswi lain yang secara langsung dibimbing oleh K.H. Ahmad Dahlan bahkan didorong untuk menempuh pendidikan umum di sekolah-sekolah colonial seperti *Neutraal Meisjes School*. Hal ini dianggap progresif pada masa itu karena perempuan pribumi masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap Pendidikan formal (Maarif, 2022).

Dengan demikiran, prinsip inklusivitas dalam sistem pendidikan K.H. Ahmad Dahlan tidak hanya bermakna integrasi kurikulum agama dan umum, tetapi juga perluasan akses pendidikan secara sosial (lintas kelas) dan gender, dua dimensi yang sejalan dengan pemahaman kontemporer tentang pendidikan inklusif sebagai agenda keadilan sosial dalam pendidikan (Ainscow & César, 2006).

KESIMPULAN

Riwayat hidup K.H. Ahmad Dahlan, mulai dari Pendidikan agama informalnya yang lintas-guru, pengalaman intelektualnya berinteraksi dengan pemikiran pembaru Timur Tengah di Mekkah, hingga keterlibatannya dalam organisasi pergerakan modern seperti Boedi Oetomo membentuk cara pandangnya bahwa ilmu agama dan ilmu umum perlu dipelajari secara terintegrasi, bukan dikotomis. Gagasan ini kemudian ia lembagakan melalui Muhammadiyah sejak 1912 hingga wafat pada 1923.

Dalam membangun system Pendidikan yang inklusif dan berkualitas, K.H. Ahmad Dahlan mewujudkan konsep "ulama-intelek" melalui kurikulum yang memadukan ilmu agama dan umum, system klasikal dengan metode kontekstual, serta

kelembagaan pendidikan yang dibiayai dan dikelola secara modern. Inklusivitas sistem tersebut tercermin pada perluasan akses Pendidikan bagi kalangan pribumi non-elit serta pembukaan akses Pendidikan bagi peremuan melalui ‘Aisyiyah, menjadikan model Pendidikan Muhammadiyah awal sebagai preseden historis penting bagi wacana pendidikan Islam inklusif di Indonesia hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N. (2015). K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis). Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, 9(1), 22–37.

Ainscow, M., & César, M. (2006). Inclusive education ten years after Salamanca: Setting the agenda. European Journal of Psychology of Education, 21(3), 231–238.

Anggraeni, D. S. (2023). Peranan organisasi Aisyiyah dalam bidang pendidikan tahun 1917-1942 (Skripsi). Universitas Jember.

Asyadulloh, M. K. (2026). Ini Rincian 88 Sekolah Muhammadiyah yang dilaporkan dalam Muktamar 1926. Diakses dari https://pwmu.co/ini-rincian-88-sekolah-muhammadiyah-yang-dilaporkan-dalam-muktamar-1926/

Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Jakarta: Kencana.

Falahuddin. (2017). Gerakan reformasi pendidikan Islam di Indonesia awal abad ke-20: Studi kasus Muhammadiyah. Schemata, 6(1), 93–106.

Hamsah, M., Nurchamidah, N., & Rasimin, R. (2021). Pemikiran pendidikan KH Ahmad Dahlan dan relevansinya dengan dunia pendidikan modern. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 7(2), 378–390.

Hukum, I. N. (2018). Modernisasi kurikulum pendidikan Islam (studi atas pemikiran Azyumardi Azra). Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 16(2), 198–215.

Kuntowijoyo. (2003). Pengantar ilmu sejarah. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Kurniasih, N. (2024). Pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dan relevansinya dengan pendidikan Islam kontemporer. Jurnal Tawadhu, 8(1), 63–74.

Maarif, S. D. (2022). Biografi singkat Siti Bariyah, Ketua ‘Aisyiyah Pertama (1917-1920). Diakses dari https://tirto.id/biografi-singkat-siti-bariyah-ketua-aisyiyah-pertama-1917-1920-gyK2

Mauliddiyah, V. L. (2025). Nyai Ahmad Dahlan dan transformasi peran gender: Pemberdayaan perempuan Muslim. Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. Diakses dari https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Muhammadiyah. (t.t.). History of Muhammadiyah. Diakses dari https://en.muhammadiyah.or.id/the-history-of-muhammadiyah

Mukhtarom, A. (2015). Menelusuri rekam jejak amal dan perjuangan KH. Ahmad Dahlan. Jurnal Dinamika Universitas Tangerang, 1(1), 1–10.

Mukhtarom, A. (2020). Pemikiran pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan. Banten: Desanta Muliavisitama.

Nugraha, A. (2010). K.H. Ahmad Dahlan: Biografi singkat (1868-1923). Yogyakarta: Garasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Setiawan, F. (2013). Kebijakan pendidikan Muhammadiyah pada masa kolonial Belanda: 1911-1942 (Tesis). Universitas Ahmad Dahlan.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Tarik, A. A., Fahmi, M., Salik, M., Nisa', M. A. A., & Hamidah. (2024). Relevansi pemikiran KH. Ahmad Dahlan bagi perwujudan pendidikan yang inklusif. J-SES: Journal of Science, Education and Studies, 3(2).

UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and framework for action on special needs education. Salamanca: UNESCO & Ministry of Education and Science, Spain.

VOI. (2022, 1 Desember). Sejarah hari ini: KH Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah pertama. Diakses dari https://voi.id/en/memori/232094

Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia